



Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan dalam Perspektif Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Apriyanti Wulandari¹, Sujatmiko², Noorman Priowicaksono³,
Maria Listiyanti⁴, Relisa⁵, Agustinus Sugeng Priyanto⁶

¹⁻⁴Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

⁵Pusat Penelitian dan Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

History of Article

Received 2022-06-10

Accepted 2022-07-27

Published 2022-07-30

Keywords: Central and regional policies, curriculum diversification.

Kata kunci : Kebijakan pusat dan daerah, diversifikasi kurikulum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan, efektifitas, dan implemtasi kurikulum disatuan pendidikan untuk menunjang pencapaian pendidikan nasional dan prioritas pembangunan di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Grup Discussion (FGD), kuestioner, dan kajian data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan pendidikan nasional belum dapat diterjemahkan dalam konteks daerah dan satuan pendidikan. Sehingga praktik pendidikan belum dijalankan dengan memperhatikan kekhasan di satuan pendidikan dan prioritas pembangunan daerah. Temuan ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menjabarkan kebijakan pendidikan nasional terutama diversifikasi kurikulum di daerah. Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan pendidikan daerah perlu menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan kekhasan lokal yang menjadi unggulan dalam rangka menerjemahkan kebijakan pendidikan pusat di daerah.

Abstrack

This study aims to examine the central and regional policies in curriculum management in education units, as well as the effectiveness of their implementation in the management of education units to support the achievement of national education and development priorities in the regions. This research is a policy research using qualitative methods. Data was collected by means of Focus Group Discussion (FGD), questionnaires, and secondary data studies. The results of the study show that national education policies cannot be translated into the context of regions and education units. So that the practice of education has not been carried out by taking into account the peculiarities of the education unit and regional development priorities. This finding encourages the Ministry of Education and Culture to work closely with the Ministry of Home Affairs in outlining national education policies, especially curriculum diversification in the regions. Regional governments as regional education policy makers need to determine the direction of education development policies as part of development priorities in the regions in accordance with local characteristics that are superior in order to translate central education policies in the regions.

© 2022, Universitas Negeri Semarang

□ Corresponding author :

Address: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
E-mail: apriyanti.wulandari@kemdikbud.go.id

ISSN 2549-5011

PENDAHULUAN

Program prioritas pembangunan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui 4 prioritas, yaitu: (1) Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata; (2) Penyediaan Afirmasi Pendidikan; (3) Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan; (4) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik, dan (5) Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan. Prioritas pembangunan pendidikan itu tentu berdampak pada bagaimana kurikulum itu dikembangkan dan diimplementasikan, baik sebagai kebijakan nasional dan dikontekstualisasi melalui diversifikasi kurikulum sebagai kebijakan pemerintah daerah.

Orientasi dan kebijakan pembangunan di daerah berpengaruh langsung terhadap dunia pendidikan setempat. Mengingat terlembaganya desentralisasi dan otonomi daerah, tentu proses penyelenggaraan kurikulum dan capaian pendidikan dasar terkunci dalam dinamika pembangunan sosial, budaya dan ekonomi di daerah. Tantangan dunia hari ini yang paling terasa dan dialami setiap hari tentulah dunia lokal di mana anak didik, orang tua murid dan komunitas setempat tumbuh dan berkembang (Puskurbuk, 2016).

Pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mendasari pengembangan kurikulum 2013 mengarahkan operasionalisasi kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan. Diversifikasi kurikulum akan memberi ruang pada satuan pendidikan untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada daerah yang bersangkutan sebagai koridor penerapan otonomi pendidikan (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2019).

Pendidikan dasar dan menengah yang kewenangannya dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat yang menetapkan standar/kebijakan pendidikan nasional untuk mendorong diversifikasi kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kemampuan pengelolaan pendidikan di daerah yang bervariasi menyebabkan penjabaran kebijakan pendidikan nasional yang diimplementasikan daerah juga bervariasi. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Pusat Penelitian dan Kebijakan, yaitu “rendahnya kemampuan daerah dalam mengembangkan kurikulum, pembiayaan pendidikan, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, dana operasional pendidikan, pengadaan buku, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan Smeru Institute di Provinsi NTB mendapatkan faktor yang mempengaruhi pendidikan antara lain (i) kualitas guru rendah, (ii) jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) kurang dengan distribusi yang tidak merata, (iii) pelatihan guru kurang, (iv) komitmen guru rendah, (v) anggaran dan infrastruktur pendidikan kurang, (vi) perhatian dan dukungan orang tua rendah, (vii) minat belajar anak rendah, (viii) pengaruh kepentingan politik kuat, (ix) pengawasan terhadap tidak tuntas, dan (x) pengawasan terhadap sekolah lemah. Permasalahan ini dapat diatasi bila pemerintah daerah melakukan intervensi kepada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan dengan membuat kebijakan dan melaksanakannya dengan baik.

Kajian Literatur

Otonomi Daerah dan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pada pasal 6 dijelaskan “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan” (Pazos, 2014). Lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan “Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum”. Pada ayat (3) dijelaskan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (Pasal 9 ayat (4)).

Otonomi daerah yang diikuti dengan otonomi pendidikan juga diikuti dengan otonomi kurikulum di satuan pendidikan. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini yang menjadi dasar bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasionalnya yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) (*No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title, 2005). Praktik penyusunan KTSP selama ini lebih mendasarkan pada praktik pendidikan tanpa memperhatikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah setempat atau Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengintervensi sekolah tanpa melihat konteks kebutuhan sekolah. Pencapaian target kurikulum akan berbeda di tingkat sekolah karena struktur rencana pendidikan, tempat, tata organisasi, sumber keuangan, karakteristik guru, masyarakat, dan siswa sangat bervariasi (Uyar & Doğanay, 2018).

Halnya Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 juga memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri. Pemerintah Pusat menyusun kurikulum nasional, pemerintah daerah menyusun muatan lokal dan kebijakan operasional terkait implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal di satuan pendidikan. Kebijakan operasional ini dapat berupa pembinaan dan pendampingan dalam rangka implementasi kurikulum, penyesuaian muatan lokal sesuai dengan arah pembangunan daerah, dan perencanaan implementasi yang akan dilakukan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan wajib yang kewenangannya terbagi menjadi:

1. Pusat menetapkan standar. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang dirumuskan dalam bentuk kriteria, metode, proses, dan praktik yang seharusnya dipenuhi. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah menetapkan kebijakan daerah berpedoman pada NSPK dari Pusat. Apabila NSPK belum tersedia, daerah tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai kebijakan daerah.
3. Pada bidang pendidikan, Provinsi mengelola pendidikan menengah dan khusus, dan Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan nonformal.

Permasalahan terbesar dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah ketergantungan daerah yang semakin besar terhadap Pemerintah baik dalam penyusunan kebijakan dan program maupun pendanaan pembangunan pendidikan di daerah. Masih terdapat tumpang tindih antara pendanaan pendidikan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota karena belum jelas aturannya dalam APBN dan APBD (Suryadi, 2014).

Diversifikasi Kurikulum

Agenda diversifikasi kurikulum adalah pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran muatan lokal yang diatur dalam Permendikbud Nomor 79 tahun 2014, pasal 2 ayat 2, adalah untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: (1) mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, (2) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sebelum bicara diversifikasi kurikulum perlu memahami struktur masyarakat Indonesia agar lebih mengenali dan mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia secara utuh.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia tercermin baik dalam 'kemajemukan horiozontal' (etnis, agama, bahasa, dan budaya) maupun 'kemajemukan vertikal' (kelas sosial-ekonomi, desa-kota, Jawa-non Jawa). Pemersatu negara bangsa Indonesia adalah bukan kesamaan etnis dan agama, apalagi warna kulit. Dari Sabang sampai Merauke tidak disatukan oleh kesamaan identitas primordial, namun oleh sebuah solidaritas dan cita-cita politik sebagai sebuah *nation*, sebuah 'komunitas yang terbayang' (Puskurbel, 2019).

Agaknya penting untuk digarisbawahi bahwa Indonesia merupakan sebuah 'negara-bangsa' yang disatukan oleh sebuah 'proyek politik' dan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Indonesia bukanlah sebuah 'bangsa' yang tunggal, melainkan sebuah 'negara' yang terdiri atas beragam 'bangsa' yang mendiami seluruh kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Keragaman ini diikat oleh suatu komitmen kebangsaan dan solidaritas bersama. Berbeda-beda namun tetap satu jua, Binneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*). Dengan

kesadaran penuh bahwa Indonesia adalah sebuah 'negara-bangsa' yang plural dan multikultural namun menyatu dalam sebuah komitmen kebangsaan, kita akan mampu memahami secara lebih baik struktur masyarakat Indonesia dari sudut pandang sosiologis (Puskurbel, 2019).

Konteks pembangunan pendidikan, kita dituntut untuk mengelola dan mengoptimalkan kemajemukan (horizontal dan vertikal) tersebut sebagai potensi dan kekuatan untuk diversifikasi kurikulum. Diversifikasi kurikulum pada hakikatnya merupakan sebuah 'praktik' sekaligus 'produk' dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat. Sebagai praktik, diversifikasi kurikulum merupakan bagian integral dari sistem rekayasa sosial (*social engineering*) oleh kelas sosial yang berkuasa atau dominan. Dalam konteks ini, diversifikasi kurikulum harus mencakup empat skill utama yang disebut UNESCO (1996) sebagai 'pilar pendidikan abad 21' yakni: (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to be*; (4) *learning to live together*. Sedangkan, sebagai sebuah produk sosial, politik dan budaya, diversifikasi kurikulum merupakan 'cermin' dari nilai-nilai dominan yang ada dalam sebuah struktur masyarakat (Puskurbel, 2019).

Kurikulum bukan hanya tentang substansi dan pembelajaran instruksional yang bermain di tingkat mikro, tetapi kurikulum terkait dengan hubungan sosial dari berbagai agen yang terlibat dan dengan kepentingan di belakangnya. Kurikulum terkait dengan kepentingan politik pemerintah pusat dan daerah, hubungan negara dan sekolah (melalui perwakilan guru dan siswa), serta hubungan sosial antara sekolah dan masyarakat. bahkan hubungan dengan pasar atau modal sangat berpengaruh (Listiyanti, 2019).

Pembangunan pendidikan dengan memperhatikan 'konteks lokal' namun tetap bervisi nasional dan global. 'Muatan lokal' tidak sekedar 'budaya lokal' yang diterjemahkan secara sempit menjadi 'bahasa lokal/daerah', namun termasuk dan terutama konteks politik-ekonomi dan sosial-budaya suatu daerah. Konteks politik merujuk pada dinamika kekuasaan di tingkat lokal yang membentuk pengaturan sumber daya daerah. Sumber daya daerah yang menjadi aktivitas ekonomi masyarakat dapat berupa pertambangan, perminyakan, agraris, maritim, pariwisata, pendidikan, jasa, atau industri. Konteks sosial budaya adalah sistem nilai dan norma yang direproduksi secara terus menerus oleh masyarakat untuk menopang kehidupan bersama. Implementasi diversifikasi kurikulum dirancang dengan memperhatikan pembangunan daerah dan membangun '*sense of belonging*' dan

'*sense of solidarity*' terhadap *negara-bangsa* Indonesia.

Mengacu pada Kurikulum 2013 yang menekankan pada praktik pengetahuan untuk menumbuhkan karakter membutuhkan upaya satuan pendidikan menyusun diversifikasi kurikulum sesuai konteks lokal satuan pendidikan tempat peserta didik berada. Pada intinya diversifikasi kurikulum merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh satuan pendidikan yang menerjemahkan kurikulum nasional dalam konteks daerah. Acuan konseptual pengembangan kurikulum operasional atau KTSP menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia;
- b. toleransi dan kerukunan umat beragama;
- c. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan
- e. tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;
- f. kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu;
- g. kebutuhan kompetensi masa depan;
- h. tuntutan dunia kerja;
- i. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- j. keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan;
- k. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- l. dinamika perkembangan global; dan
- m. karakteristik satuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Grup Discussion (FGD), kuesioner dan kajian data sekunder. Data sekunder meliputi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan fokus penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan, teori dari para ahli dan dokumen kurikulum satuan pendidikan. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan pengisian kuesioner terhadap sumber data. Pengumpulan data berdasarkan studi eksplorasi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengembangkan model kebijakan. Ujicoba model kebijakan di 4 daerah, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota

Kupang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Balikpapan. Hasil uji coba model kebijakan ini dijadikan penguatan praktik diversifikasi kurikulum yang belum berjalan optimal.

Analisis data penelitian dilakukan sebagai berikut.

1. Analisis Kualitatif

Dilakukan untuk mengolah data yang bersumber dari diskusi terfokus dan data sekunder. Data ini akan memberikan gambaran umum pelaksanaan diversifikasi kurikulum satuan pendidikan dalam konteks daerah beserta dukungan kebijakan yang ada. Analisis data kualitatif akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, grafik untuk melihat hubungan antardata atau aspek penelitian, dan selanjutnya menyimpulkan data yang diperoleh sekaligus dilakukan verifikasi terhadap hasil analisis.

2. Perumusan Rekomendasi

Pada penelitian ini rekomendasi yang dihasilkan berupa Naskah Akademik dan Model Diversifikasi Kurikulum dengan dukungan Kebijakan Daerah. Naskah akademik sebagai landasan untuk penerbitan peraturan perundang-undangan terkait rencana aksi yang mendorong kebijakan pemerintah daerah mengembangkan diversifikasi kurikulum yang memuat indikator kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan diversifikasi kurikulum. Model Diversifikasi Kurikulum sebagai contoh pengembangan kurikulum yang memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur pikir berikut.

1. Pergeseran kebijakan Pembangunan Nasional berdampak pada perubahan pengembangan kurikulum nasional dalam penyiapan SDM.

2. Pembangunan nasional merupakan sinergi pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tidak dapat mengunggulkan salah satu dimensi saja.

3. Pengembangan kurikulum nasional memperhatikan dimensi internal dan eksternal

4. Ide, desain, struktur kurikulum nasional diterjemahkan menjadi Ide, Desain, Struktur kurikulum satuan pendidikan

5. Kebijakan pembangunan nasional diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah untuk sinergi dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya konteks daerah.

6. Kebijakan pembangunan daerah memiliki otoritas dalam penyiapan SDM dengan

intervensi kebijakan Pemda dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda diversifikasi kurikulum harus ditempatkan dalam konteks pembangunan pendidikan yang responsif dan sensitif terhadap konteks lokal. Termasuk dalam konteks lokal ini adalah keragaman sosio-kultural masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang harus diakomodasi, direkognisi, dan didayagunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Diversifikasi kurikulum dapat mengadaptasi model *Culturally Responsive Teaching (CRT)* yang menekankan penggunaan sumber daya, pengetahuan lokal, dan pengalaman siswa yang beragam dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas (Gay, 2000 dalam Arrobi, 2019 dalam Puskurbel 2019).

Berbagai potensi lokal inilah yang belum dijadikan sebagai konteks pembelajaran, sebagaimana daerah-daerah yang dijadikan uji coba memiliki potensi yang beragam. Mulai dari Kota Kupang yang memiliki pesona alam dan sejarah yang luar biasa. Kota Balikpapan memiliki potensi tambang di satu sisi, namun di sisi lain dihadapkan pada masalah lingkungan hidup selain potensi perdagangan dan berbagai jasa yang juga berkembang. Kota Bandar Lampung yang berjudul Kota Tapis Berseri memiliki kerajinan Tapis, kerajinan kriya lain selain potensi perkebunan dan lautnya yang juga menjanjikan. Kabupaten Banyuwangi memiliki Pegunungan Ijen yang terkenal dengan keindahannya dan penghasil belerang beserta ragam budayanya yang sudah mulai dikenal secara internasional. Potensi-potensi lokal ini yang harus dioptimalisasi dengan menyiapkan tenaga kerja melalui pendidikan agar dapat menjadi suatu keunggulan lokal yang bersifat nasional dan global sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Menjadikan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan daerah dan melibatkan banyak pihak di dalamnya merupakan suatu tantangan, mengingat selama ini pendidikan cenderung memfokuskan pada penguasaan pengetahuan semata. Implementasi Kurikulum 2013 yang menuntut perubahan paradigma pembelajaran belum terjadi pada praktik di lapangan. Diversifikasi kurikulum di daerah harus dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan mutu pendidikan (Gunung, Raya, & Pusat, 2015). Masalah menjauhkan pemuda dari pertanian dapat diintervensi dengan kebijakan pendidikan daerah, misalnya dengan menetapkan kurikulum

pangan & pertanian” dengan memasukkan pelajaran memasak dan taman sekolah pada tahap sekolah dasar untuk memperkuat hubungan anak dengan pangan, lingkungan dan masyarakat (Chang, 2020). Untuk daerah yang sering mengalami bencana alam, diperlukan kurikulum khusus kebencanaan. Pendidikan kebencanaan bertujuan untuk menumbuhkan penguasaan siswa terhadap pengetahuan tentang setiap bencana itu sendiri serta perencanaan pencegahan, pengurangan, pertolongan, dan kesiapsiagaan bencana, untuk menetapkan pandangan yang benar tentang bencana dan menangani bencana serta kejadian dan perkembangannya dengan cara yang tepat.

Setiap satuan pendidikan yang dilibatkan dalam penelitian, baik ketika eksplorasi maupun uji coba model, hampir seluruhnya menyatakan sudah menerapkan diversifikasi kurikulum di satuan pendidikannya dan sudah mengacu pada visi dan misi daerahnya. Berikut adalah beberapa contoh dokumen kurikulum yang dianalisis untuk menilai sejauh mana rancangan diversifikasi kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan.

Permasalahan Pendidikan

Beberapa responden mengangkat masalah pendidikan yang mereka alami baik di satuan pendidikan maupun daerahnya. Responden dari DKI Jakarta merasa muatan lokal yang saat ini diterapkan yaitu PLBJ (Pengenalan Lingkungan Budaya Jakarta) dan mata pelajaran Bahasa Inggris meliputi bahasan yang sama. Cakupan mata pelajaran PLBJ yaitu Seni Budaya Betawi dan Budaya Jakarta; Sains dan Teknologi; Lingkungan Hidup Jakarta; dan Wisata Jakarta. Mata pelajaran Bahasa Inggris substansinya meliputi Seni Budaya Betawi, Budaya Jakarta, sains, lingkungan hidup, teknologi dan kemasyarakatan serta pariwisata. Kesamaan aspek ini membingungkan dalam implementasi. Konteks lokal dan global membantu siswa mempraktikkan pengetahuan mereka yang melampaui pengetahuan sehari-hari mereka. Namun, perlu untuk mempertimbangkan nilai dan kepercayaan, kebutuhan dan kemampuan spesifik konteks lokal sesuai tradisi, kebutuhan dan kemampuan siswa, tanpa mengorbankan apa yang penting untuk konten mata pelajaran.

Sementara Bapak Joko Gembiro sebagai praktisi pendidikan dari Yogyakarta menyoroti politisasi dunia pendidikan. misalnya pendidikan gratis, membuat satuan pendidikan kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat. Selain itu pendidikan karakter juga penting untuk menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu

diperlukan suatu kebijakan pendidikan yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi pemerintah (Solichin, 2015).

Kebijakan Provinsi DI Yogyakarta mencanangkan pendidikan berbasis budaya hanya berjalan di pendidikan menengah, sedangkan pada pendidikan dasar hanya memaknainya sebatas muatan lokal wajib yang ditentukan provinsi (Bahasa Jawa). Masih perlu ditingkatkan kompetensi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di satuan pendidikan agar dapat mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan konteks satuan pendidikan disampaikan oleh Ibu Siti sebagai TPK Provinsi DI Yogyakarta sekaligus Kepala SMAN 1 Karang Mojo. Guru dianggap memiliki peran penting dan diharapkan dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Fakta bahwa 'faktor' ini adalah manusia dan, yang lebih penting, seorang profesional pendidikan yang harus memiliki ruang lingkup untuk penilaian dan kebijaksanaan terlalu sering dilupakan (*Gove_What Is Education For?*, n.d.)

Fokus pembangunan Kota Kupang untuk 2 tahun ke depan masih prioritas pada pembangunan sarana dan prasarana, yaitu pembangunan dan penerangan jalan, air bersih, dan taman kota. Pengukuran hasil pendidikan masih pada pencapaian nilai UN, sehingga belum memperhatikan kurikulum yang kontekstual. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Lebih lanjut Kepala Dinas menyatakan pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal, untuk itu perlu peran pengawas dalam melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaannya. Beliau terinspirasi dengan penelitian ini untuk membuat semacam pemetaan sekolah berdasarkan potensi kesenian lokalnya. Baik provinsi maupun kota belum menetapkan suatu muatan lokal khusus yang diterapkan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan menerapkan secara beragam dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Ibu Maria Listiyanti dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menekankan bahwa diversifikasi kurikulum tidak selalu berbentuk muatan lokal, bisa juga mengkontekskan berbagai kompetensi dalam kurikulum nasional. Misalnya pada peserta didik kelas 1 s.d. 3 SD masih terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Ibu, maka pembelajaran di satuan pendidikan perlu juga mengakomodasi hal ini agar konsep pengetahuan yang dibangun baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat dapat terjalin dengan utuh.

Pemberlakuan sistem zonasi di sekolah-sekolah negeri, menjadikan diversifikasi kurikulum yang diusung satuan pendidikan menjadi penting. Label apa yang akan dibangun satuan pendidikan dengan input siswa yang tidak dapat dikontrol menjadi tantangan bagi penyelenggara pendidikan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memfasilitasi hal ini, karena tidak seperti dulu, satuan pendidikan perlu membuat label selain pencapaian akademik (mengingat tidak ada syarat nilai UN). Misalnya, menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat event, budaya, atau lainnya. Sistem zonasi menjadi pemicu bagi satuan pendidikan untuk menjalankan diversifikasi kurikulum ditegaskan oleh Bapak Zaki dari UGM.

Pengakuan perhitungan jam mengajar mulok belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih terhambat dengan belum adanya SK Gubernur tentang muatan lokal, sehingga guru-guru yang mengajar muatan lokal belum dapat disetarakan jam mengajarnya. Selain itu, muatan lokal di Kota Balikpapan masih belum menampilkan kearifan lokal/budaya/ciri khas dari daerah tersebut. Sumber budaya meliputi ide-ide akal sehat dan pengetahuan budaya masyarakat lokal mengenai realitas sehari-hari. Pengetahuan ini dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama untuk mengembangkan pemahaman tentang area tertentu (Tan, 2016).

Halnya Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung juga mengalami masalah pengakuan jam mengajar muatan lokal (Bahasa Lampung) yang tidak masuk dalam Dapodik sehingga tidak diakui untuk penghitungan sertifikasi profesi.

Gerakan Lampung mengaji menjadi prioritas, sebagaimana disampaikan oleh beberapa responden bahwa banyak peserta didik yang belum bisa mengaji, sehingga satuan pendidikan merasa perlu menyambut program ini. Sebagian besar responden menerapkan diversifikasi kurikulum dengan program penguatan karakter untuk membentuk nilai religius, sehingga banyak program keagamaan yang dirancang dan diimplementasikan di satuan pendidikan.

Bapak Joko Purwanto dari SDN 2 Rawa Laut mengemukakan kekhawatirannya kalau pendidikan dasar dan menengah menjadi terputus programnya dikarenakan adanya pemisahan pengelolaan, pendidikan dasar dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan menengah dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi. Jalur koordinasi perlu dibangun antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup provinsi yang sama untuk sinergi program pendidikan dasar dan menengah.

Menguatkan peran pemerintah daerah, Ibu Mega Puri sebagai Kabid Pendidikan Dasar menyatakan selama ini banyak program terkait pendidikan, antara lain muatan pencegahan radikalisme dan tertib lalu lintas. Selama ini, Dinas Pendidikan belum memiliki pemetaan satuan pendidikan mana yang sesuai untuk berbagai macam program, pemilihan belum berdasarkan dukungan data. Bisa jadi ada banyak program terkumpul di satu satuan pendidikan, sehingga agak sulit untuk memantau pencapaian dari suatu program. Pihak Dinas Pendidikan akan mencoba menata kembali kebijakan pendidikan dengan memerhatikan hal ini dan mengoptimalkan peran pengawasan dan pendampingan melalui Tim Pengembang Kurikulum. Muatan lokal yang dilaksanakan saat ini, Bahasa Lampung sebagai muatan lokal provinsi, sedangkan Kota Bandar Lampung belum menyusun muatan lokal sesuai dengan kekhasan daerah dan kebutuhan peserta didik setiap jenjang.

Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi masih dibayangi masalah putus sekolah yang cukup tinggi. Diperkirakan sebanyak 25% lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sutikno dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Daerah memiliki program GADA AMPUH (Program Anak Muda Putus Sekolah) untuk menjaring anak usia sekolah yang putus sekolah.

Perencanaan kurikulum di satuan pendidikan umumnya melibatkan guru dan dilakukan workshop pada awal tahun pelajaran. Umumnya rancangan program yang disusun dapat berjalan dengan baik selama kurang lebih 2 minggu setelahnya sudah tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini disampaikan oleh seorang responden dari SMA. Inkoherensi kurikulum dan kegagalan dan diskontinuitas di sekolah yang sebenarnya karena konstruksi teoritis tidak sesuai dan tidak sesuai dengan masalah pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya (Kridel, 2012). Pengembangan kurikulum harus dimulai dengan analisis kebutuhan dan diakhiri dengan proses evaluasi. Analisis kebutuhan akan menentukan kebutuhan dan harapan sekolah dan pemangku kepentingan dengan melibatkan orang-orang yang memahami budaya dan kebutuhan sekolah (Uyar & Doğanay, 2018). Sehingga program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kurikulum Satuan Pendidikan untuk Menunjang Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk melihat keterkaitan antara kurikulum dengan arah pembangunan daerah yang tercermin dalam visi dan misi daerah, penelitian ini menganalisis beberapa sampel kurikulum satuan pendidikan. Berikut adalah kurikulum yang dilakukan telaah:

Tabel 1. Sampel Kurikulum Sekolah yang Dianalisis

No	Nama Daerah	Nama Satuan Pendidikan
1	Kota Kupang, NTT	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 4 Kupang • SMP Kristen Tunas Bangsa Kupang
2	Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> • SDN 001 Balikpapan Utara • SMPN 14 Balikpapan • SMAN 2 Balikpapan • SMKN 2 Balikpapan
3	Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • SDN 2 Rawa Laut • SDN 1 Kupang Raya • SDN 1 Tanjung Senang • SMPN 33 Bandar Lampung • SMPN 1 Bandar Lampung
4	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • SDN 3 Panderejo • SDN 4 Panganjuran • SMPN 1 Banyuwangi

Berdasarkan analisis dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dianalisis dapat disimpulkan:

- Seluruh satuan pendidikan memiliki visi yang hampir sama. Visi ini dirumuskan kondisi ideal, sehingga selaras dengan visi di atasnya.
- Satuan pendidikan masih belum dapat menjabarkan visi dalam misi, dan menjadi tujuan satuan pendidikan yang dapat terukur. Visi dan misi merupakan tujuan bersama warga satuan pendidikan, yang diharapkan dapat menciptakan beberapa perubahan di sekolah, antara lain perubahan budaya di sekolah, dan peningkatan partisipasi masyarakat sekolah (Bandur, 2012).
- Beberapa satuan pendidikan sudah terlihat praktik diversifikasinya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, hanya dalam pembiasaan untuk menanamkan karakter bentuk kegiatannya masih tidak

terlihat perbedaan antar satuan pendidikan (masih sama dan cenderung seragam). Meskipun visi daerah sudah diwadahi oleh satuan pendidikan, namun belum terlihat dalam program-programnya. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi ingin menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai national geopark belum terlihat dalam program di satuan pendidikan.

- Belum tergambar cara melakukan penilaian pencapaian tujuan satuan pendidikan, siapa yang melakukan penilaian dan bagaimana pemanfaatan hasil penilaiannya. Seharusnya dilakukan penilaian secara internal dan juga penilaian eksternal oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan untuk memetakan kinerja satuan pendidikan. Selama ini sah saja bagi satuan pendidikan mencantumkan tujuan yang tinggi meskipun tidak tercapai karena tidak memberikan dampak.
- Sekolah yang bagus memiliki banyak program, seperti adiwiyata, sekolah sehat, lalu lintas dan lain sebagainya. Program-program ini masih tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga ada pengklasifikasian. Seharusnya program ini juga dapat dijadikan sebagai konteks pembelajaran yang artinya, guru harus menyusun bahan ajar sendiri sesuai dengan konteks yang ingin dibangun. Namun, kualitas guru sering didefinisikan dan direduksi menjadi kinerja siswa dalam ujian nasional dan terkait erat dengan pemahaman sumber daya manusia tentang peran pendidikan dalam pertumbuhan (Novelli & Sayed, 2016). Sehingga banyak guru yang lebih fokus mengajar untuk ujian.
- Satuan pendidikan masih perlu pendampingan dalam menyusun dokumen kurikulum mengingat masih belum terkait antara visi, misi, dan tujuan, serta penjabarannya dalam program satuan pendidikan (RKAS).
- Perlu ada revitalisasi pengelolaan satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan terkait kurikulum. Selama ini Dinas Pendidikan hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disusun dan

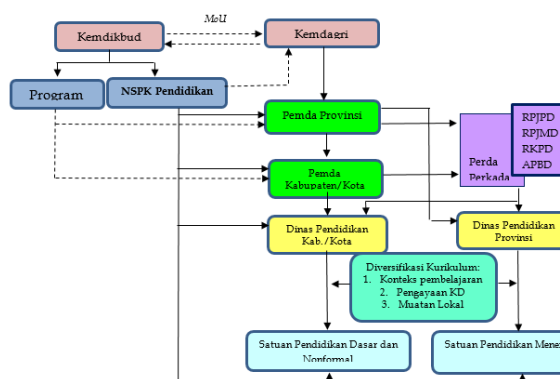
belum sampai pada melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Sehingga praktik kurikulum di satuan pendidikan tidak sesuai dengan dokumen kurikulum yang disusunnya.

- Kurikulum satuan pendidikan dapat dikatakan sebagai program. Karena ada intervensi yang diperkenalkan untuk mencapai tujuan. Program harus dievaluasi, melibatkan penilaian formal dan informal tentang nilai program, evaluasi formal “menerapkan prosedur ilmiah untuk pengumpulan dan analisis informasi tentang isi, struktur, dan hasil program”.

Pengembangan Model Kebijakan

Merujuk pada data yang ditemukan saat studi eksplorasi maupun uji coba model, masih terlihat bahwa pada dunia pendidikan terlihat masih dominan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di level satuan pendidikan. Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan, terutama terkait dengan perancangan maupun implementasi kurikulum masih sangat terbatas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan tidak dapat langsung menjangkau satuan pendidikan sebagai penyelenggara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pendidikan yang perlu direspon oleh Pemerintah Daerah agar dapat terimplementasi dengan baik, terutama di bidang kurikulum agar implementasinya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan daerah. Berikut peran para pihak yang dapat mendukung terlaksananya diversifikasi kurikulum di satuan pendidikan.



Gambar 2. Model Diversifikasi Kurikulum dengan Dukungan Pemerintah Daerah (sumber: Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan)

SIMPULAN

Belum seluruh satuan pendidikan menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan potensi daerah. Beberapa daerah sudah menetapkan beberapa aturan terkait diversifikasi kurikulum, seperti muatan lokal, hanya saja pada praktiknya tidak/belum dikawal dengan baik dan belum ada target maupun indikator keberhasilan yang diharapkan.

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pendidikan daerah perlu menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan di daerah sesuai dengan kekhasan lokal yang menjadi unggulan dalam rangka menerjemahkan kebijakan pendidikan pusat di daerah. Kementerian pendidikan maupun pengambil kebijakan di pusat perlu juga memfasilitasi agar Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya merancang maupun mengimplementasikan pendidikan sesuai dengan arah pembangunan di daerah dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Penelitian ini memberikan usulan kepada pengambil kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan untuk:
 - Melakukan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan NSPK pendidikan di daerah.
 - Menyosialisasikan arah dan kebijakan pendidikan nasional kepada Kepala Daerah dan DPR/D secara rutin.
 - Membuat Indikator Dukungan Pemda terhadap Pendidikan.
 - Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan terkait implementasi kurikulum (berdiversifikasi).
 - Program afirmasi pendidikan maupun alokasi dana pendidikan pusat ke daerah didasarkan pada capaian indikator dukungan Pemda terhadap pendidikan.
2. Pemerintah Daerah sebagai pengelola pendidikan di daerah untuk:
 - Menyusun *grand desain* pendidikan daerah sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah dan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

- Menyusun program kerja pendidikan daerah dan menentukan target/indikator ketercapaian untuk setiap satuan pendidikan.
- Melakukan pendampingan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum (diversifikasi) di satuan pendidikan.
- Memberikan penghargaan ataupun pembinaan terhadap satuan pendidikan terkait ketercapaian target/indikator oleh satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandur, A. (2012). School-based management developments: Challenges and impacts. *Journal of Educational Administration*, 50(6), 845–873. <https://doi.org/10.1108/09578231211264711>
- Chang, W. (2020). 鄉村小學食農教育課程發展之行動研究. (June 2016).
- Gove_What is education for? (n.d.). Retrieved from <https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/blogs/gove-speech-to-rsa.pdf>
- Gunung, J., Raya, S., & Pusat, J. (2015). *Curriculum Diversification in the Framework of. 21*, 317–338.
- Kridel, C. (2012). Journal of Curriculum Studies. *Encyclopedia of Curriculum Studies*. <https://doi.org/10.4135/9781412958806.n275>
- Listiyanti, M. (2019). Menimbang Pendekatan Pembangunan Manusia Dalam Merancang Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 125–138. <https://doi.org/10.17509/jpis.v28i2.17867>
- No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. (2005). 53(9), 1689–1699.
- Novelli, M., & Sayed, Y. (2016). Teachers as agents of sustainable peace, social cohesion and development: Theory, practice & evidence. *Education as Change*, 20(3), 15–37. <https://doi.org/10.17159/1947-9417/2016/1486>
- Pazos, C. S. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Analysis of Micro-Earthquakes in the San Gabriel Mountains Foothills Region and the Greater Pomona Area As Recorded By a Temporary Seismic Deployment*, 1(hal 140), 43. Retrieved from <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Tan, C. (2016). Teacher agency and school-based curriculum in China's non-elite schools. *Journal of Educational Change*, 17(3), 287–302. <https://doi.org/10.1007/s10833-016-9274-8>
- Uyar, M. Y., & Doğanay, A. (2018). A school-based curriculum development for the teaching principles and methods course. *Croatian Journal of Education*, 20(2), 621–672. <https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2736>
- Joesoef, Daoed. (2014). *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2018). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun*

- 2019: *Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2019). *Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2019). *Naskah Konsep Penelitian Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan: antara Kebutuhan dan Kesenjangan Koordinasi Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2019). *Desain Penelitian Diversifikasi Kurikulum Satuan Pendidikan: antara Kebutuhan dan Kesenjangan Koordinasi Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2016). *Naskah Konsep Dasar Penelitian Profil Lulusan Pendidikan Dasar terhadap Pembangunan Manusia dalam rangka Pengembangan Kebijakan Kurikulum Masa Depan*. Jakarta: Pusurbuk.
- Pusat Penelitian Kebijakan. (2014). *Kajian Efektifitas Desentralisasi Pendidikan. (Peran Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak yang Berkepentingan/Stakeholders dalam Implementasi Kurikulum 2013)*. Jakarta: Puslitjak, Balitbang Kemdikbud.
- Suryadi, Ace. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025, Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- SMPN 4 Kupang. (2019). *Kurikulum SMPN 4 Kupang*.
- SMP Kristen Tunas Bangsa Kuprang. (2019). *Kurikulum SMP Kristen Tunas Bangsa Kuprang*.
- SDN 001 Balikpapan Utara. (2019). *Kurikulum SDN 001 Balikpapan Utara*.
- SMPN 14 Balikpapan. (2019). *Kurikulum SMPN 14 Balikpapan*.
- SMAN 2 Balikpapan. (2019). *Kurikulum SMAN 2 Balikpapan*.
- SMKN 2 Balikpapan. (2019). *Kurikulum SMKN 2 Balikpapan*.
- SDN 3 Panderejo. (2019). *Kurikulum SDN 3 Panderejo*.
- SDN 4 Pangajuran. (2019). *Kurikulum SDN 4 Pangajurane*.
- SMPN 1 Banyuwangi. (2019). *Kurikulum SMPN 1 Banyuwangi*.
- SDN 2 Rawa Laut. (2019). *Kurikulum SDN 2 Rawa Laut*.
- SDN 1 Kupang Raya. (2019) *Kurikulum SDN 1 Kupang Raya*.
- SDN 1 Tanjung Senang. (2019). *Kurikulum SDN 1 Tanjung Senang*.
- SMPN 33 Bandar Lampung. (2019). *Kurikulum SMPN 33 Bandar Lampung*.
- SMPN 1 Bandar Lampung. (2019). *Kurikulum SMPN 1 Bandar Lampung*.